

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keselamatan Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing-masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK banyak program yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari pilar dalam RUNK yang belum terlaksana ataupun belum terlaksana secara maksimal karena belum tahu dan paham mengenai prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2021-2040 mencapai 72,45, dengan rincian pencapaian:
 - 1) Pilar I sebesar 61,81%
 - 2) Pilar II sebesar 76,16%
 - 3) Pilar III sebesar 73,17%
 - 4) Pilar IV sebesar 53,98%
 - 5) Pilar V sebesar 97,16%
- b. Indeks Fatalitas Per Panjang Jalan Pada tahun 2018 mencapai angka 12,69% pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai angka 15,72%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi pada angka 18,74%, Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan pada angka 17,43% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi pada angka 18,34%. Indeks fatalitas per panjang jalan terjadi penurunan dan kenaikan dikarenakan pertumbuhan jumlah kendaraan dan tingkat pertumbuhan lebar jalan tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam berkendara, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 merupakan mas puncak covid-19 sehingga mobilitas masyarakat berkurang dan mengurangi tingkat fatalitas pengendara.

- c. Indeks fatalitas per kendaraan terdaftar tiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari tahun 2018 yang semula mencapai angka 0,009% pada tahun 2019 mencapai angka 0,010%, kemudian pada tahun 2020 mencapai angka 0,012% dan pada tahun 2021 mencapai 0,012%.
- d. Jumlah korban meninggal dunia berdasarkan kejadian kecelakaan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Diketahui berdasarkan data tahun 2018 ada 33,60%, di tahun 2019 menjadi angka 37,77%, Kemudian tingkat kecelakaan pada tahun 2020 menjadi angka 53,45%, selanjutnya pada tahun 2021 57,67%, dan pada tahun 2022 menjadi 56,17%.
- e. Identifikasi daerah rawan kecelakaan (DRK) menggunakan metode EAN. Hasil analisis daerah rawan kecelakaan yang dilakukan pada seluruh ruas jalan di Kabupaten Tangerang menggunakan metode EAN diperoleh 5 ruas yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan metode EAN / AEK terdapat 5 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Penentuan titik kecelakaan (blackspot) dilakukan dengan menggunakan metode cumulative summary (cussum) dipadukan dengan EAN pada 5 ruas yang dipilih sebagai prioritas penanganan berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi dari tim magang Kabupaten Tangerang yaitu ruas jalan serang km 35, ruas jalan raya cisoka adiyasa, ruas jalan tigaraksa, ruas jalan raya kresek, dan ruas jalan raya cadas kukun.

VII.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di kabupaten tangerang yaitu:

- a. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 pilar keselamatan lalu lintas agar tiap-tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggung jawab guna meningkatkan program-program keselamatan agar target RUNK dapat tercapai.
- b. Perlu adanya pelaksanaan terkait program-program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan program RUNK yang telah terlaksana.
- c. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK yang nantinya akan menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program-program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.
- d. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, serta bahaya sisi jalan dan koordinasi terpadu oleh 5 stakeholder pilar keselamatan dalam penanganan lokasi rawan kecelakaan.
- e. Peningkatan pencatatan data kejadian kecelakaan agar lebih lengkap dan detail untuk memudahkan dalam melakukan analisis.
- f. Perlu adanya penilaian secara kualitatif terhadap pencapaian indikator RUNK yang lebih spesifik.
- g. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil analisis penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mengurangi atau menghilangkan daerah rawan kecelakaan.
- h. Untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan perlu adanya koordinasi yang baik perihal surat yang berkaitan dengan pengambilan data di beberapa instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 PILAR RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN*. (n.d.). Retrieved December 6, 2022, from <https://perhubungan.slemankab.go.id/5-pilar-rencana-umum-nasional-keselamatan/>
- Audit Keselamatan Jalan | AWD | United Gank*. (n.d.). Retrieved December 13, 2022, from <https://unitedgank007.blogspot.com/2016/01/audi-keselamatan-jalan.html>
- Cegah Kecelakaan dengan Jalan Berkeselamatan*. (n.d.). Retrieved December 7, 2022, from <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5799199/bagaimana-cegah-kecelakaan-dengan-jalan-berkeselamatan-ini-penjelasan-pakar>
- Dan, K., Pd, B., Permukiman, D., & Wilayah, D. P. (n.d.). *Penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas*.
- Djaman, L. S. (n.d.). *PERATURAN_PEMERINTAH_37-TAHUN-2017*.
- DPUPKP - JENIS KERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR (Bagian Kedua)*. (n.d.). Retrieved December 7, 2022, from <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/64/jenis-kerusakan-jalan-pada-perkerasan-lentur-bagian-kedua>
- Draft-Rencana-Aksi-Keselamatan-Jalan*. (n.d.).
- Empat Jalan Tol Baru Ini akan Melintas Kabupaten Tangerang | kumparan.com*. (n.d.). Retrieved December 9, 2022, from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/empat-jalan-tol-baru-ini-akan-melintas-kabupaten-tangerang-1w6GHfnMDSp/full>
- Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. (n.d.). Retrieved December 14, 2022, from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>
- Identifikasi Kebutuhan Pendanaan KLLAJ, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya - MSYARIF.ID*. (n.d.). Retrieved December 11, 2022, from

<https://msyarif.id/identifikasi-kebutuhan-pengadaan-barang-pekerjaan-konstruksi-jasa-konsultansi-dan-jasa-lainnya/>

Jurnal Surveying; Sistem Informasi Geospasial (SIG) – Frasta Training. (n.d.).

Retrieved December 6, 2022, from <https://frastatraining.com/jurnal-surveying-sistem-informasi-geospasial-sig/>

Khusus Beberapa contoh penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah, A. (n.d.). *Subbagian Hukum BPK* .

Lintas Dan Angkutan Jai, L., Pemerintah Nomor, P., Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tertang, menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu, Undang-Undang Dasar Negara, ayat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, K., Kesei, N., & Lalu Lintas Dan Angkutan, A. (n.d.). *Menimbang Mengingat Menetapkan REPUBUK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM.*

Panduan Keselamatan Bersepeda Motor Di Jalan | PPID Kabupaten Purbalingga.

(n.d.). Retrieved December 14, 2022, from

<https://ppid.purbalinggakab.go.id/panduan-keselamatan-bersepeda-motor-di-jalan/>

Pengertian Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-Undang –

Paralegal.id. (n.d.). Retrieved December 5, 2022, from

<https://paralegal.id/pengertian/keamanan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>

Pengertian Keselamatan di Jalan Raya Beserta Fungsinya | kumparan.com. (n.d.).

Retrieved December 13, 2022, from <https://kumparan.com/info-otomotif/pengertian-keselamatan-di-jalan-raja-beserta-fungsinya-1wu7v5GBF8u/3>

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Impelementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved December 11, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/159861/permen-pupr-no-05prtm2015-tahun-2015>

PERPRES No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved December 5, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97822/perpres-no-105-tahun-2018>

PKPU 14 THN 2020. (n.d.).

PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (n.d.). Retrieved December 6, 2022, from <https://www.jogloabang.com/kesehatan/pp-47-2016-fasilitas-pelayanan-kesehatan>

PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved December 7, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49168>

Premi Asuransi: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya. (n.d.). Retrieved December 11, 2022, from <https://lifepal.co.id/media/premi-asuransi/>

REFORMASI KEBIJAKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI INDONESIA, LANGKAH BALITBANGHUB MENGANGGULANGI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG - Website Badan Kebijakan Transportasi. (n.d.). Retrieved December 13, 2022, from <https://baketrans.dephub.go.id/berita/reformasi-kebijakan-perlintasan-sebidang-di-indonesia-langkah-balitbanghub-menanggulangi-kecelakaan-di-perlintasan-sebidang>

Tilang elektronik untuk penegakan hukum . (n.d.). Retrieved December 14, 2022, from <https://id.berita.yahoo.com/tilang-elektronik-untuk-penegakan-hukum-125419491.html>

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved December 13, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39896>